

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2)
- (b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi

APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

- (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- (e) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005.
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25)
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- (j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- (k) Peraturan Bupati Badung No. 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
- (l) Peraturan Bupati Badung No. 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
- (m) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020
- (n) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 70 Tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Penjelasan belanja yang realisasi keuangannya dibawah 75%

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.2. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang adadalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Neraca

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Kesimpulan Penting tentang Laporan Keuangan

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Pemerintah Kabupaten Badung telah berhasil melakukan capaian kinerja secara akumulatif terhadap aspek-aspek yang sifatnya indikator makro ekonomi dan indikator sosial yang strategis. Adapun aspek capaian indikator makro ekonomi dan sosial meliputi : pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, IPM, kemiskinan dan pengangguran.

Tingkat inflasi Kabupaten Badung selalu berada dibawah tingkat inflasi nasional. Kondisi ini menunjukkan kemampuan dan ketahanan perekonomian masyarakat Kabupaten Badung. Sedangkan untuk angka IPM Kabupaten Badung cukup tinggi diantara Kabupaten di Bali. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun menurun. Langkah-langkah yang telah ditempuh antara lain melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2020, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain :

- 1) Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan
 - a. Mengevaluasi Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan sesuai kondisi di lapangan.
 - b. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang ada.
 - c. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
 - d. Mengembangkan koordinasi secara sinergis antara satuan kerja terkait di bidang pendapatan daerah.
- 2) Arah dan kebijakan umum bagian belanja
 - a. Belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
 - b. Belanja daerah pada tiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerjanya
 - c. Belanja daerah dialokasikan untuk melaksanakan program, kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis)
 - d. Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif mewujudkan sasaran

kinerja

- 3) Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan
 - a. Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah
 - b. Pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memenuhi kewajiban daerah yang segera harus dipenuhi.
 - c. Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Berdasarkan kondisi dan permasalahan pembangunan Kabupaten Badung serta untuk mewujudkan adanya peningkatan pembangunan dikaitkan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2020 dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 maka dirumuskan sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Sesuai dengan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yakni :

•Visi :

Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang maju,damai dan sejahtera.

•Misi :

1. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
3. Memperkuat pembangunan bidang pertanian,perikanan dan kelautan yang bersaing dengan kepariwisataan berbasis budaya.

2. Tujuan dan Sasaran.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas, dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung maka tujuan dan Sasaran yang ditetapkan adalah :

- Tujuan :

1. Meningkatkan pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi.
2. Meningkatkan Pemberian Pelayanan kepada masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informasi.
3. Meningkatkan SDM sektor Komunikasi dan Informasi.

- Sasaran :

1. Terwujudnya pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi sesuai kebutuhan.
2. Terwujudnya pelayanan kebutuhan masyarakat akan jasa komunikasi dan informasi yang andal, efektif dan efisien.
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) sektor Komunikasi dan Informatika yang mampu dan terampil di bidangnya.
4. Terwujudnya peran serta masyarakat di bidang komunikasi dan komunikasi yang tertib, aman, lancar dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5. Terwujudnya aparatur dan masyarakat yang berbudaya informasi.
6. Terwujudnya pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi informasi secara efektif dan efisien.

3. Rencana Kerja :

Setelah ditetapkan Tujuan maupun Sasaran, lebih lanjut perlu adanya program dan kegiatan untuk mencapai tujuan / sasaran tersebut. Pelaksanaan program dan kegiatan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa.
- Program Peningkatan kualitas pemahaman dalam penyerapan informasi Media.
- Program Pengelolaan Persandian Daerah.
- Program Pengembangan Data/ Informasi/statistik,

Bab III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020.

Tabel.3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja LRA per 30 Desember 2020

Uraian	Anggaran	R 2020	%
PENDAPATAN	120.000.000,00	155.944.896,38	128,89
BELANJA	70.474.953.835,24	68.547.082.094,41	97,26
SURPLUS/ (DEFISIT	70.353.963.835,24	68.391.137.198,03	97,21
PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00

Capaian pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp. 155.944.896,38 Komponen pendapatan terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2020	%
PAD	120.990.000,00	155.944.896,38	128,89
Jumlah	120.990.000,00	155.944.896,38	128,89

Komponen pendapatan asli daerah terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2020	%
Pendapatan Retribusi Daerah	120.990.000,00	132.108.000,00	109,19
Jumlah	120.990.000,00	132.108.000,00	109,19

Komponen Lain2 PAD terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2020	%
Lain-Lain PAD Yang Sah	00,00	23.836.890,38	0,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terdiri :

Uraian	Anggaran	R 2020	%
Dana Darurat-LRA	00,00	6,00	0,00

Capaian belanja sebesar 97,21% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut.

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Tahun 2020

NO	BELANJA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	%
		Rp	Rp	
1.	Belanja Tidak Langsung	9.934.996.368,00	9.260.276.341,00	93,21
2.	Belanja Langsung	60.539.957.467,24	59.286.805.753,41	97,93
	Jumlah	70.474.953.835,24	68.547.082.094,41	97,26

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 sebesar Rp 9.260.276.341,00 atau sebesar 93,21 % dari anggaran Rp. 9.934.996.368,00 Komponen Belanja Tidak Langsung terdiri dari

Uraian	Anggaran	R 2020	%
Belanja pegawai	9.934.996.368,00	9.260.276.341,00	93,21
jumlah	9.934.996.368,00	9.260.276.341,00	93,21

Komponen Belanja Pegawai terdiri dari :

Uraian	Anggaran (Rp)	R 2020 (Rp)	%
Belanja gaji dan tunjangan	4.095.532.926,00	3.814.027.025,00	93,13
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.979.283.442,00	4.637.249.316,00	93,13
Honorarium PNS	859.280.000,00	809.000.000,00	93,13
Honorarium Non PNS	900.000,00	0.00	0.00
Jumlah	9.934.996.368,00	9.260.276.341,00	93,21

Realisasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2020 sebesar Rp 59.286.805.753,41 atau 97,93 % dari anggaran Rp. 60.539.957.467,24

Komponen Belanja Langsung terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2020	%
Belanja barang jasa	41.453.908.549,24	40.221.933.965,01	97,03
Belanja modal	19.086.048.918,00	19.064.871.788,40	99,89
jumlah	60.539.957.467,24	59.286.805.753,41	97,93

Komponen Belanja Barang dan Jasa terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2020	%
Belanja bahan pakai habis	518.766.778,24	326.330.900,00	62,90
Belanja Cetak dan Penggandaan	66.027.600,00	39.485.000,00	59,80
Belanja Jasa Kantor	32.846.588.026,00	32.625.704.490,00	99,33
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	139.400.000,00	60.776.550,00	47,90
Belanja Makanan dan Minuman	36.136.300,00	22.395.200,00	61,97
Belanja Perjalanan Dinas	8.674.600,00	8.674.600,00	100
Belanja Pemeliharaan	5.958.617.245,00	5.364.760.625,01	90,03
Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	34.656.600,00	73,31
Belanja Premi Asuransi	162.324.000,00	108.216.000,00	66,67
Belanja Pakaian Kerja	5.600.000,00	5.280.000,00	94,29
Belanja Jasa Konsultansi	223.124.000,00	208.054.000,00	93,25
Belanja Honorarium Non PNS	1.437.600.000,00	1.417.600.000,00	98,61

Belanja Honorarium PNS	1.050.000,00	0.00	0.00
Jumlah	41.453.908.549,24	40.221.933.965,01	97,03

Komponen Belanja Modal terdiri dari :

Uraian	Anggarnan	R 2020	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.086.048.918,00	19.064.871.788,40	99,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	00,00
Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya	0,00	0,00	00,00
Jumlah	19.086.048.918,00	19.064.871.788,40	99,89

Belanja Langsung di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, yang terinci sebagai berikut.

Tabel 3.3 Realisasi Belanja di Tiap Program Tahun 2020

No	Program	Aggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
1	Pelayanan Administrasi	1,040,935,626	738,188,754	70.92
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	157,782,100	60,247,300	38.18
3	Pengembangan Peningkatan Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	222,582,900	171,241,500	76.93
4	Perencanaan dan Penganggaran SKPD (Renja ,RKA)	9,359,100	8,311,000	88.80
5	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa	20,929,788,801.24	20,343,023,579.40	97.20
6	Peningkatan kualitas pemahaman dalam penyerapan informasi media	2,966,800	2,552,000	86.02
7	Pengelolaan Persandian Daerah	52,477,000	52,156,000	99.39
8	Pengembangan Data /informasi/Statistik Daerah	8,447,200	8,326,300	98.57
9	Pengembangan Komunikasi ,Informasi&Media	38,975,797,940	38,711,759,320	99.32
	JUMLAH	61,400,137,467.24	60,095,805,753.41	97.88

- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Masukan dana : Rp. 132.254.226,-
 - Realisasi : Rp. 107.432.904,-
 - Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi,Listrik,air dan Telepon pada Diskominfo dengan target kinerja 12 bulan.
 - Hasil : Terpenuhinya jasa komunikasi,listrik,air dan Telepon Dengan realisasi 81,23 %.
 - Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung.
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Masukan dana : Rp 39.400.000,-

- Realisasi : Rp. 18.814.550,-
- Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang disamsat dan KIR dengan target
- Hasil : Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas / Oprasional SKPD / Unit, dengan realisasi sebesar 47,75 %.
- Sasaran : Kendaraan Dinas/Oprasionalpada Diskominfo KabupatenBadung.

3. Penyediaan jasa keuangan

- Masukan dana : Rp. 8.062.500,-
- Realisasi : Rp. 2.058.000,-
- Keluaran : Jumlah Penyediaan materai pada Dinas Kominfo
- Hasil : Tersedianyamaterai pada Diskominfo capaian realisasi 25,53%.
- Sasaran : Dinas Komunikasi dan Informatika Badung.

4. Penyediaan alat tulis kantor :

- Masukan dana : Rp. 63.818.300,-
- Realisasi : Rp. 44.788.100,-
- Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor dengan target kinerja 12 bulan
- Hasil : Terwujudnya alat tulis kantor 12 Bulan realisasi 70,18 %.
- Sasaran : Alat Tulis Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan :

- Masukan dana : Rp. 32.806.200,-
- Realisasi : Rp. 15.375.000,-
- Keluaran : Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan yang memadai 12 bulan
- Hasil : Terwujudnya barang cetak dan penggandaan dengan target 12 bulan dengan realisasi sebsera 46,87 %.
- Sasaran : Barang Cetak dan Penggandaan Diskominfo Kabupaten Badung.

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor :

- Masukan dana : Rp. 35.000.000,-
- Realisasi : Rp. 8.748.900,-

- Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan Kantor Yang memadaidengan target kinerja 1 paket.
- Hasil : Optimalnya fungsi instalasi listrik/ penerangan bangunkantor pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 1 paket dengan realisasi 25.00 %.
- Sasaran : Komponen Listrik/Penerangan bangunan Kantor Diskominfo Kabupaten Badung.

7. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan :

- Masukan dana : Rp. 84.840.000,-
- Realisasi : Rp. 20.825.000,-
- Keluaran : Terlaksananya kebutuhan bacaan pada Diskominfo
- Hasil : Tercapainya kebutuhan bahan bacaan pada Diskominfo Dengan realisasi 24,55%.
- Sasaran : Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman:

- Masukan dana : Rp. 23.898.800,-
- Realisasi : Rp. 10.157.700,-
- Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu dengan target kinerja 12 Bulan.
- Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman TamuDengan capaian kenerja 12 bulan, realisasi 42,50 %.
- Sasaran : Pegawai dan Tamu pada Diskominfo Kabupaten Badung.

9. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah :

- Masukan dana : Rp. 7.099.600,-
- Realisasi : Rp. 7.099.600,-
- Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah dengan target kinerja 1 Paket/ 1 Tahun.
- Hasil : Terwujudnya Sinergi dan Koordinasi keluar daerah Dengan capaian kinerja 100 %.
- Sasaran : Diskominfo Kabupaten Badung.

10. Kegiatan penyediaan dekorasi :

- Masukan dana : Rp. 26.800.000,-

- Realisasi : Rp. 22.400.000,-
- Keluaran : Tersedianya bahan sarana dekorasi Kantor pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan target kinerja 1 Paket.
- Hasil : Terwujudnya Keindahan dan Keserasian Kantor pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 83,58 %.
- Sasaran : Diskominfo Kabupaten Badung

11. Penyediaan bahan bakar kendaraan :

- Masukan dana : Rp. 192.660.000,-
- Realisasi : Rp. 99.168.000,-
- Keluaran : Jumlah bahan bakar kendaraan/Oprasional yang tersedia Pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan target kinerja 12 bulan.
- Hasil : Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 51,47 %.
- Sasaran : Kendaraan Dinas/ Operasional Diskominfo.

12. Kegiatan penyediaan upacara keagamaan :

- Masukan dana : Rp. 45.132.000,-
- Realisasi : Rp. 38.745.000,-
- Keluaran : Terlaksananya bahan upacara keagamaan pada Kabupaten Badung dengan target kinerja 12 bulan
- Hasil : Tersedianya upacara keagamaan pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 85,85 %.
- Sasaran : Sesajen/Aci-aci

13. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap:

- Masukan dana : Rp. 349.164.000,-
- Realisasi : Rp. 342.576.000,-
- Keluaran : Jumlah Tenaga Kontrak Yang Dibayarkan
- Hasil : Meningkatnya Konerja Tenaga Kontrak dengan capaian kinerja 98,11 %.
- Sasaran : Diskominfo Kabupaten Badung

A. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor:

- Masukan dana : Rp. 0,-
- Realisasi : Rp. 0,-
- Keluaran : Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk Diskominfo Kabupaten Badung
- Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk Diskominfo Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 0 %.
- Sasaran : Perlengkapan Gedung Kantor

2. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor :

- Masukan dana : Rp. 0,-
- Realisasi : Rp. 0,-
- Keluaran : Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan target 53 unit
- Hasil : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 0 %.
- Sasaran : Peralatan Gedung Kantor.

3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor :

- Masukan dana : Rp. 3.500.000,-
- Realisasi : Rp. 1.183.500,-
- Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor, dengan target 1 Paket.
- Hasil : Terwujudnya Gedung Kantor yang Representatif, capaian kinerja 33,81 %.
- Sasaran : Bagian gedung/kantor yang rusak pada Diskominfo Kabupaten Badung.

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Masukan dana : Rp. 100.000.000,-
- Realisasi : Rp. 42.962.000,-
- Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dengan target kinerja 35 kendaraan.
- Hasil : Optimalnya fungsi kendaraan dinas /operasional dengan capaian kinerja 41,96 %.
- Sasaran : Kendaraan dinas/Oprasional

5. Kegiatan Pemeliharaan perlengkapan Gedung kantor:
 - Masukan dana : Rp. 0,-
 - Realisasi : Rp 0,-
 - Keluaran : Adanya Pemeliharaan Peralatan kantor untuk Diskominfo Kabupaten Badung
 - Hasil : Tersedianya pemeliharaan peralatan kantor untuk Diskominfo Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 0 %.
 - Sasaran : Terpeliharaan peralatan Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan peralatan kantor:
 - Masukan dana : Rp. 43.212.700,-
 - Realisasi : Rp. 9.552.400,-
 - Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang baik dengan target kinerja 1 Paket.
 - Hasil : Terpeliharanyai peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja 22,11 %.
 - Sasaran : Perlengkapan gedung kantor yang rusak pada Diskominfo
7. Monitoring dan dan Evaluasi pada Diskominfo
 - Masukan dana : Rp. 4.480.400,-
 - Realisasi : Rp. 4.295.000,-
 - Keluaran : Jumlah dokumen laporan monitoring dan dan Evaluasi pada Diskominfo, dengan target kinerja 10 buku.
 - Hasil : Terkendalinya kegiatan pada Diskominfo sesuai rencana dengancapaian kinerja 95,86 %
 - Sasaran : Seluruh kegiatan pada Diskominfo Kabupaten Badung.
8. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional :
 - Masukan dana : Rp. 0,-
 - Realisasi : Rp. 0,-
 - Keluaran : -
 - Hasil : Tersedianya Kendaraan Roda 2 dan 4 dengan target Kinerja sebesar 0 %
 - Sasaran : Dinas Kominfo dan Informatika Kabupaten Badung
9. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh PPHP :
 - Masukan dana : Rp. 3.272.600,-
 - Realisasi : Rp. 0,-
 - Keluaran : Presentase Sarana Prasarana Kerja Pegawai yg Terpenuhi

- Hasil : Indek PMPRB Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Sasaran : Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Rapat Command Center :
- Masukan dana : Rp. 3.316.400,-
 - Realisasi : Rp. 3.254.400,-
 - Keluaran : Jumlah BMD yang di inventarisasi
 - Hasil : Indek PMPRB Diskominfo, dengan target kerja 98,13 %.
 - Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung.

B. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD :
 - Masukan dana : Rp. 215.914.300,-
 - Realisasi : Rp. 165.212.500,-
 - Keluaran : Presentase serapan anggaran sesuai anggaran kas
 - Hasil : Indeks PMPRB Pada Dinas Kominfo dengan capaian kinerja 76,52 %
 - Sasaran : Pelaksana kegiatan pada Diskominfo.
2. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :
 - Masukan dana : Rp. 6.668.600,-
 - Realisasi : Rp. 6.029.000,-
 - Keluaran : Prosentase Dokumen Akip yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - Hasil : Indeks PMPRB Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian 90,41 %.
 - Sasaran : Kinerja Diskominfo.

C. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD (Renja ,RKA)

1. Penyusunan Perencanaan Dokumen SKPD
 - Masukan dana : Rp. 9.359.100,-
 - Realisasi : Rp. 8.311.000,-
 - Keluaran : Prosentase Dokumen Perencanaan yang Dilaksanakan Tepat Waktu
 - Hasil : Indeks PMPRB Pada Dinas Kominfo ,dengan capaian kinerja 88,80 %
 - Sasaran : Kigiatan Diskominfo

D. Program Pengelolaan Persandian Daerah :

1. Pengelolaan Teknis Persandian

- Masukan dana : Rp. 43.031.700,-
- Realisasi : Rp. 43.012.000,-
- Keluaran : Jumlah SDM Pengelola Persandian Yang Kompeten
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ,dengan capaian kinerja 99,95 %
- Sasaran : -

2. Pengelolaan Pengamanan Informasi, Peralatan Samsi Jaringan Komunikasi Samsi :

- Masukan dana : Rp. 4.038.700,-
- Realisasi : Rp. 3.874.000,-
- Keluaran : Jumlah Peralatan Persandiaan yang Dipergunakan Dalam Pengamanan Informasi
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ,dengan capaian kinerja 95,92 %
- Sasaran : Pemerintahan Kabupaten Badung.

3. Kontra Pengindraan/Setrelisasi Terhadap Ruang Kerja Pimpinan :

- Masukan dana : Rp. 3.019.000,-
- Realisasi : Rp. 2.922.500,-
- Keluaran : Ruang Kerja Pimpinan dan Ruang Vital Lainnya yang Diajaga Keamanan Informasinya.
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ,dengan capaian kinerja 96,80 %
- Sasaran : Pemerintahan Kabupaten Badung

4. Sertifikat Elektronik :

- Masukan dana : Rp. 2.387.600,-
- Realisasi : Rp. 2.347.500,-
- Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah Yang Menggunakan Tanda Tangan Digital.
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ,dengan capaian kinerja 98,32 %
- Sasaran : Pemerintahan Kabupaten Badung

E. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa :

1. Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung :

- Masukan dana : Rp. 1.073.992.800,-
- Realisasi : Rp. 946.058.005,-
- Keluaran : Presentase Kamera CCTV yang Berfungsi Optimal
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dengan capaian kinerja 88,09 %.
- Sasaran : Kamera CCTV yang terpasang pada kawasan Strategis di Kabupaten Badung

2. Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada kawasan Strategis di Kabupaten Badung :

- Masukan dana : Rp. 2.545.000,-
- Realisasi : Rp. 2.545.000,-
- Keluaran : Jumlah Kawasan Yang Terpantau CCTV
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dengan hasil kinerja 100 %.
- Sasaran : Kawasan strategis Kabupaten Badung yang belum terpasang CCTV

3. Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung :

- Masukan dana : Rp. 4.635.415.223,-
- Realisasi : Rp. 4.541.425.523,-
- Keluaran : Jam Hidup Data Center dalam Setahun
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dengan capaian kinerja 97,97 %.
- Sasaran : Data Center di Kabupaten Badung .

4. Penerapan Teknologi informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung:

- Masukan dana : Rp. 1.516.086.400,-
- Realisasi : Rp. 1.424.201.966,-
- Keluaran : Jumlah Aplikasi Terbangun
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Dengan capaian kinerja 93,94 %
- Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung.

5. Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung :

- Masukan dana : Rp. 623.672.100,-
- Realisasi : Rp. 623.329.900,-

- Keluaran : Jumlah SDM Pengelola Pusat Kendali
 - Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik,dengan capaian kinerja 99.95 %.
 - Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung.
6. Pemeliharaan WEB di Kabupaten Badung :
- Masukan dana : Rp. 55.744.400,-
 - Realisasi : Rp. 55.684.400,-
 - Keluaran : Jumlah Website yang Sesuai Standar
 - Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dengan capaian 99.89 %
 - Sasaran : Website Kabupaten Badung.
7. Pengelolaan Pusat Kendali di Kabupaten Badung :
- Masukan dana : Rp. 386.179.200,-
 - Realisasi : Rp. 378.918.400,-
 - Keluaran : Jumlah SDM Pusat Kendali
 - Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dengan capaian kinerja 98,12 %.
 - Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung .
8. Pameran Pembangunan :
- Masukan dana : Rp.0,-
 - Realisasi : Rp. 0,-
 - Keluaran : -.
 - Hasil : -
 - Sasaran : -.
9. Pameran Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung,
- Masukan Dana : Rp. 0,-
 - Realisasi : Rp. 0,-
 - Keluaran : -.
 - Hasil : -
 - Sasaran : -.
10. Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi,
- Masukan Dana : Rp. 8.520.400,-
 - Realisasi : Rp 3.570.000,-
 - Keluaran : Presentase PPID Pembantu

- Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dengan Kinerja 41,90%
- Sasaran : Masyarakat Kabupaten Badung

11. Pengelolaan Data dan Informasi Publik,

- Masukan Dana : Rp. 315.378.700,-
- Realisasi : Rp. 304.536.000,-
- Keluaran : Presentase PPID Pembantu
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dengan Kinerja 96,56%
- Sasaran : Masyarakat Kab. Badung

12. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik,

- Masukan Dana : Rp. 120.000,-
- Realisasi : Rp. 120.000,-
- Keluaran : Presentasi PPID Pembantu
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dengan Kinerja 99.22%
- Sasaran : Peserta Sosialisasi

13. Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Masyarakat (KKIM) Berbasis Web (TI),

- Masukan Dana : Rp. 6.811.300,-
- Realisasi : Rp. 6.808.300,-
- Keluaran : Jumlah KKIM yang ternemtuk berbasis IT
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dengan kinerja 99,96%
- Sasaran : Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Badung

14. Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi,

- Masukan Dana : Rp. 129.619.700,-
- Realisasi : Rp. 115.110.000,-
- Keluaran : Persentase Menara Telekomunikasi Yang Terbangun Sesuai Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.
- Hasil : Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik , dengan kinerja 88,81%
- Sasaran : Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung

15. Penyelenggaraan Retribusi Menara

- Masukan Dana : Rp. 15.678.100,-
- Realisasi : Rp. 11.407.000,-
- Keluaran : Prosentase Menara Telekomunikasi yang terbangun sesuai rencana induk Menara Telekomunikasi Terpadu.
- Hasil : Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan kinerja 72,76%
- Sasaran : Jumlah Menara Telekomunikasi Eksisting Objek Retribusi

16. Penyusunan Review Zona Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu

- Masukan Dana : Rp. 4.559.900,-
- Realisasi : Rp. 4.348.000,-
- Keluaran : Presentase Menara Telekomunikasi yang Terbangun Sesuai Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu
- Hasil : Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan kinerja 95,35%
- Sasaran : Tersajinya Laporan Hasil Survey

17. Pelayanan Informasi Melalui Lembaga Penyiaran

- Masukan Dana : Rp. 67.603.800,-
- Realisasi : Rp. 6.829.020,-
- Keluaran : Jumlah Akses Pengaduan Masyarakat
- Hasil : Tersedianya Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Badung, dengan kinerja 10.10%
- Sasaran : -

18. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

- Masukan Dana : Rp. 18.272.448,24,-
- Realisasi : Rp. 11.758.200,00
- Keluaran : Jumlah Akses Pengaduan Masyarakat
- Hasil : Tersedianya Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Badung, dengan kinerja 100.00%
- Sasaran : Masyarakat Kabupaten Badung

19. Pengadaan Perangkat Manajemen Bandwidth dan Security

- Masukan Dana : Rp. 5.568.159.000,-
- Realisasi : Rp. 5.548.111.395,-
- Keluaran : Kapasitas Bandwidth

- Hasil : Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan kinerja 99.64%
- Sasaran : Gedung-Gedung di Kawasan Puspem Kab. Badung.

20. Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Intranet/Internet

- Masukan Dana : Rp. 5.793.756.800,-
- Realisasi : Rp. 5.675.924.600,-
- Keluaran : Jumlah Intranet/Internet yang Berfungsi Optimal
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dengan kinerja 97.97%
- Sasaran : Infrastruktur Jaringan Intranet/Internet

21. Pelatihan Pengelolaan Call Center Nomor Panggilan Darurat 112 :

- Masukan Dana : Rp. 864.900,-
- Realisasi : Rp. 72.000,-
- Keluaran : Jumlah Akses Pengaduan Masyarakat
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dengan kinerja 8,32%
- Sasaran : Perangkat Daerah

22. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

- Masukan Dana : Rp. 498.264.030,-
- Realisasi : Rp. 478.440.870,40,-
- Keluaran : Cakupan Informasi Konten dan Media Komunikasi
- Hasil : Tersampainya Konten dan Informasi pada Masyarakat, dengan kinerja 96,02%
- Sasaran : Masyarakat Kabupaten Badung

23. Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dan Pengaduan 14084

- Masukan Dana : Rp. 208.544.600,-
- Realisasi : Rp. 203.825.000,-
- Keluaran : Jumlah Media Pengaduan Masyarakat
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dengan kinerja 97,74%
- Sasaran : Kelompok Masyarakat

F. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman Dalam Penyerapan Infomasi Media

24. Literasi Media,

- Masukan Dana : Rp. 2.966.800,-
- Realisasi : Rp. 2.552.000,-
- Keluaran : Jenis Kelompok yang disosialisasikan
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dengan kinerja 86,02%
- Sasaran : Masyarakat Luas (SMP, Karang Taruna dan PPK)di Kabupaten Badung

G. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

25. Pengembangan Penyediaan Akses Internet :

- Masukan dana : Rp. 38.975.797.940,-
- Realisasi : Rp. 38.711.759.320,01,-
- Keluaran : Jumlah Lokasi Yang Terkoneksi Jaringan Internat/Intranet
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Dengan capaian 99,32 %.
- Sasaran : Kantor Camat, Kantor Desa/Kelurahan, Banjar, SD,SMP, Puskesmas, Obyek Wisata, di Kab. Badung dan Kawasan Puspem

H. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

26. Penggandaan Data Sektoral Statistik :

- Masukan dana : Rp. 2.304.000,-
- Realisasi : Rp. 2.290.300,-
- Keluaran : Jumlah Data Statistik yang Valid.
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan capaian kinerja 96.22 %
- Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung

27. Forum Data Statistik :

- Masukan dana : Rp. 3.385.400,-
- Realisasi : Rp. 3.385.000,-
- Keluaran : Jumlah Forum Kordinasi Pengelola Data Statistik.
- Hasil : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, capaian kinerja 99,99 %.
- Sasaran : Pemrintah Kabupaten Badung

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Pada Umumnya kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak terlalu signifikan namun dalam capaian kinerja yang dihadapi terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Tidak tepatnya jadwal pelaksanaan dilapangan dengan Anggaran Kas.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana

3.3 Penjelasan belanja yang realisasi keuangannya di bawah 75 % :

1. Belanja telepon pada kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik anggaran setelah perubahan sebesar Rp 10.800.000,00 realisasinya Rp 7.599.107,00 (70,36%) kurang dari 75% dikarenakan disesuaikan dengan pemakaian tiap bulan.
2. Belanja Jasa KIR pada kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional anggaran setelah perubahan sebesar Rp 300.000,00 terealisasi sebesar Rp 69.150,00 (23,05%) kurang dari 75% karena disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang akan di KIR
3. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan pada kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional anggaran setelah perubahan sebesar Rp 39.100.000,00 terealisasi sebesar Rp 18.745.400,00 (47,94%) kurang dari 75% karena disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang akan disamsat.
4. Belanja Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Anggaran setelah perubahan Rp. 63.818.300,00 terealisasi sebesar Rp. 44.788.100,00 (70,18 %) kurang dari 75% karena adanya penawaran harga dan disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Belanja Cetak pada Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Anggaran setelah perubahan Rp. 14.308.700,00 terealisasi sebesar Rp10.195.00,00 (71,25 %) kurang dari 75% karena adanya penawaran harga dan disesuaikan dengan kebutuhan
6. Belanja Fotocopy pada Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Anggaran setelah perubahan Rp. 18.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.800.000,00 (26,67 %) kurang dari 75% karena adanya penawaran harga dan disesuaikan dengan kebutuhan.
7. Belanja Bahan Alat Listrik dan Elektronik pada kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran setelah perubahan sebesar Rp 30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 8.748.900,00 (25,00%) kurang dari 75% Karena pemeliharaan hanya dilakukan pada barang yang rusak..
8. Belanja surat kabar/majalah pada kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, anggaran setelah perubahan sebesar Rp 84.840.000,00

terrealisasi sebesar Rp. 20.825.000,00 (24,55%) kurang dari 75% Karena direalisasikan sesuai dengan tagihan.

9. Belanja Makanan dan Minuman tamu pada Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, anggaran setelah perubahan Rp 23.898.800,00 realisasi Rp 10.157.700,00 (42,50%) kurang dari 75% karena adanya covid-19 maka tamu-tamu yang berkunjung berkurang datang ke diskominfo..
10. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya pada kegiatan Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan, anggaran setelah perubahan Rp. 8.062.500,00 realisasi sebesar Rp. 2.058.000,00 (25,53%), kurang dari 75% karena disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
11. Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada kegiatan Penyediaan jasa pegawai tidak tetap, anggaran setelah perubahan Rp. 19.764.000,00 terealisasi sebesar Rp. 13.176.000,00 (66,67%), kurang dari 75% karena adanya peraturan baru pemerintah mengenai besaran pengenaan BPJS
12. Belanja bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas kegiatan Penyediaan bahan bakar kendaraan, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 192.660.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.168.000,00 (51,47) kurang dari 75% karena adanya Covid-19 mobilitas kegiatan dibatasi sehingga BBM yang direalisasikan sesuai kebutuhan.
13. Belanja Pemeliharaan Kantor/Gedung/Bangunan pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor anggaran setelah perubahan Rp 3.500.000,00 realisasi sebesar Rp 1.183.500,00 (33,81%) kurang dari 75% karena sesuai dengan ada atau tidaknya Perbaikan Gedung Kantor
14. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran setelah perubahan sebesar Rp 100.000.000,00 realisasinya Rp 41.962.000,00 (41,96) kurang dari 75% karena disesuaikan dengan perawatan kendaraan.
15. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor pada kegiatan Pemeliharaan Peralatan kantor, anggaran setelah perubahan sebesar Rp 43.212.700,00 terealisasi sebesar Rp 9.552.400,00 (22,11%) kurang dari 75% Karena sedikitnya computer yang rusak
16. Belanja alat tulis kantor kegiatan pemeliharaan hasil pekerjaan oleh panitia penerima hasil pekerjaan, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.272.600,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00) kurang dari 75% karena tidak adanya kegiatan belanja modal maka ATK PPHP tidak direalisasikan.
17. Honorarium pelaksana kegiatan pada kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, anggaran setelah perubahan sebesar Rp.

135.450.000,00 terealisasi sebesar Rp. 89.310.000,00 (65,94%) kurang dari 75% karena disesuaikan dengan pagu anggaran

18. Honorarium penerima hasil pekerjaan pada kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 5.040.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.240.000,00 (64,29%) kurang dari 75% karena disesuaikan dengan BAST yang ada.
19. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa pada kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.340.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00%) kurang dari 75% karena tidak adanya perlengkapan administrasi yang di ajukan ke subag keuangan.
20. Belanja Penjilidan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD anggaran setelah perubahan sebesar Rp 298.500,00 terealisasi sebesar Rp. 120.000,00 (40,20%) kurang dari 75% karena Realisasi Anggaran Sesuai Kebutuhan.
21. Belanja alat tulis kantor Kegiatan Pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 10.346.200,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00%), kurang dari 75% karena disesuaikan dengan kebutuhan
22. Belanja premi asuransi kesehatan Kegiatan Pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.480.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.320.000,00 (66,67%), kurang dari 75% karena disesuaikan dengan kebutuhan.
23. Belanja fotocopy Kegiatan Pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00%), kurang dari 75% karena disesuaikan dengan kebutuhan
24. Belanja penjilidan Kegiatan Pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 99.500,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00%), kurang dari 75% karena disesuaikan dengan kebutuhan
25. Belanja Bahan Alat Kerja Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet/Intranet di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 34.656.600,00 (69,31%), kurang dari 75% karena riil belanja disesuaikan dengan kebutuhan
26. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet/Intranet di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 32.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 21.600.000,00 (66,67%), kurang dari 75% karena riil belanja disesuaikan dengan kebutuhan

27. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet/Intranet di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 66.761.200,00 (44,51%), kurang dari 75% karena riil belanja disesuaikan dengan kebutuhan
28. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Kegiatan Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 37.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 25.200.000,00 (66,67%), kurang dari 75% karena riil belanja disesuaikan dengan kebutuhan
29. Belanja Pemeliharaan CCTV Kegiatan Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 284.665.205,00 (71,17%), kurang dari 75% karena riil belanja disesuaikan dengan kebutuhan
30. Belanja Kawat/faximili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit Kegiatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 105.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 42.677.566,00 (40,45%), kurang dari 75% karena tergantung dengan jumlah pemakaian per bulan.
31. Belanja Premi asuransi kesehatan Kegiatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 27.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 18.000.000,00 (66,67%), kurang dari 75% karena penyesuaian peraturan/tariff baru BPJS.
32. Belanja Alat tulis kantor Kegiatan pelayanan informasi public dan dokumentasi, anggaran setelah perubahan Rp. 6.700.400,00, terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (29,85%), kurang dari 75% karena belanja disesuaikan dengan kebutuhan
33. Belanja Alat tulis kantor Kegiatan pengelolaan data dan informasi publik, anggaran setelah perubahan Rp. 4.308.700,00, terealisasi sebesar Rp0,00 (0,00%), kurang dari 75% karena belanja disesuaikan dengan kebutuhan
34. Belanja premi asuransi Kegiatan pengelolaan data dan informasi publik, anggaran setelah perubahan Rp. 17.280.000,00, terealisasi sebesar Rp. 11.520.000,00 (66,67%), kurang dari 75% karena pembayaran premi menyesuaikan tarif resmi BPJS
35. Belanja Alat tulis kantor Kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat, anggaran setelah perubahan Rp. 7.370.448,00, terealisasi sebesar Rp. 2.638.200,00 (35,79%), kurang dari 75% karena dalam rangka efisiensi anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan
36. Belanja fotocopy Kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat, anggaran setelah perubahan Rp. 1.200.000,00, terealisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00%), kurang dari 75% karena dalam rangka efisiensi anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan

37. Belanja penjilidan Kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat, anggaran setelah perubahan Rp. 398.000,00, terealisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00%), kurang dari 75% karena dalam rangka efisiensi anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan
38. Belanja jasa publikasi Kegiatan pelayanan informasi melalui lembaga penyiaran, anggaran setelah perubahan Rp. 67.453.800,00, terealisasi sebesar Rp. 6.679.020,00 (9,90%), kurang dari 75% karena efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan media public yang ada.
39. Belanja bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas Kegiatan penyelenggaraan retribusi menara telekomunikasi, anggaran setelah perubahan Rp. 6.300.000,00, terealisasi sebesar Rp. 2.700.000,00 (42,86%), kurang dari 75% karena disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
40. Belanja fotocopy Kegiatan penyelenggaraan retribusi menara telekomunikasi, anggaran setelah perubahan Rp. 1.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 375.000,00 (37,50%), kurang dari 75% karena disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
41. Belanja Premi asuransi kesehatan Kegiatan pengelolaan pusat kendali Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 21.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 14.400.000,00 (66,67%), kurang dari 75% karena menyesuaikan dengan tarif premi BPJS.
42. Belanja Alat tulis kantor Kegiatan pengelolaan layanan Nomor tunggal panggilan darurat 112 Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.122.600,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00%), kurang dari 75% karena dalam rangka efisiensi anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan
43. Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya Kegiatan pengelolaan layanan Nomor tunggal panggilan darurat 112 Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 72.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00%), kurang dari 75% karena dalam rangka efisiensi anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan
44. Belanja Cetak Kegiatan pengelolaan layanan Nomor tunggal panggilan darurat 112 Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00%), kurang dari 75% karena untuk pembuatan cetak stiker dan sosialisasi masih ada.
45. Belanja Penjilidan Kegiatan pengelolaan layanan Nomor tunggal panggilan darurat 112 Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 150.000,00 terealisasi sebesar Rp. 95.000,00 (63,33%), kurang dari 75% karena dalam rangka efisiensi anggaran belanja disesuaikan dengan kebutuhan
46. Belanja Alat tulis kantor Kegiatan pelatihan pengelolaan call center Nomor tunggal panggilan darurat 112 Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp.

- 792.900,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00%), kurang dari 75% karena kegiatan pelatihan tidak berjalan dikarenakan perekrutan tenaga kontrak 112 tidak terlaksana
47. Belanja Alat tulis kantor Kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 598.230,00 terealisasi sebesar Rp. 440.500,00 (73,63%), kurang dari 75% karena efisiensi
48. Belanja penjilidan Kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 90.000,00 terealisasi sebesar Rp. 57.000,00 (63,33%), kurang dari 75% karena efisiensi
49. Belanja honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00%), kurang dari 75% karena narasumber dari PHRI Bali berhalangan hadir karena menghadiri rapat bersama gubernur Bali
50. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli PNS Kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.050.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00%), kurang dari 75% karena narasumber yang hadir adalah eselon 2 (Sekda Badung dan Kadis Kominfo) hasil koordinasi ke keuangan tidak diperkenankan untuk mendapatkan honor.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- **Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas**

Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

- **Basis Akrua (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca**

Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. NERACA

I. ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi.

I.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum disetor ke kas

daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

I.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

I.3. Belanja dibayar di muka

Belanja dibayar di muka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

I.4. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

I.5. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.7. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APFP.

I.8. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.9. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

II. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva tang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

II.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

II.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya

tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

II.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

II.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya

lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

II.5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

II.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

II.7. Akumulasi Penyusutan

Depresiasi / penyusutan atas Aktiva Tetap sampai dengan 31 Desember 2020 dihitung sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016.

III. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

III.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

III.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak jud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Aset Lain-lain dicatat dengan nilai ninal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya.

I V. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

IV.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa

potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

IV.2 . Uang Muka Kas Daerah

Merupakan saldo Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal Neraca. Perkiraan ini merupakan perkiraan timbal balik (reciprocal) yang akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

IV.3. Pendapatan Ditangguhkan

Merupakan saldo uang yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari wajib pajak dan wajib retribusi yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal Neraca.

Perkiraan ini merupakan perkiraan timbal balik (reciprocal) yang akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

IV.4. Hutang Jangka Pendek Lainnya

Hutang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Hutang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

V. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

V.1. EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar terdiri dari Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Cadangan Aset Lancar Lainnya dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

V.2 .EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

II. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan pelaporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional disajikan

sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan disajikan tepat waktu. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sbb:

a. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah Pendapatan Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik yang diterima secara tunai maupun masih berupa piutang.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan kondisi antara lain: Beban diakui sebelum pengeluaran kas, Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dan beban diakui setelah pengeluaran kas. Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban atas beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban disajikan dalam Laporan Operasional disesuaikan dengan klasifikasi ekonomi yaitu

- Beban Operasi
- Beban Transfer
- Beban Non Operasional
- Beban Luar Biasa

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban antara lain

- Pengeluaran Beban tahun berkenaan

Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja

- Informasi lainnya yang dianggap perlu

c. Surplus/Defisit dari operasi

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos ini.

d. Kegiatan Non Operasional

e. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa

f. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah

g. Surplus/Defisit LO

Merupakan surplus/defisit Lo pada akhir periode pelaporan yang dipindahkan ke pelaporan perubahan ekuitas.

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN – LRA

Jumlah Pendapatan-LRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam Tahun Anggaran 2020 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 120.990.000,00 terealisasi sebesarRp. 132.108.000,- Sedangkan realisasi pendapatan LRA tahun 2019 sebesar Rp. 132.108,00,-

Perbandingan Realisasi Pendapatan LRA Per 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai Stándar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut :

Tabel 5.1.1 Realisasi Pendapatan LRA Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Target setelah Angg. Perubahan 2020	Realisasi 2020		Realisasi 2019
			Rp	%	
a	Pendapatan Asli Daerah (PAD) LRA	120.990.000,00	132.108.000,00	109,19	132.108.000,00
	J U M L A H	120.990.000,00	132.108.000,00	109,19	132.108.000,00

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah -LRA, target anggaran setelah perubahan 2020 sebesar Rp. 120.990.000,- terealisasi sebesar Rp. 132.108.000,- sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2019 sebesar Rp. 132.108.000,- Rincian atas Realisasi PAD – LRA tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
a.	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	120.990.000.00	132.108.000,00	109,19	132.108.000.00
	Lain-lain PAD yang sah.		23.836.890,38	0.00	11.367.208,08
	LAINI-LAIN		6,00	0.00	0.00
	PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA		6,00	0.00	0.00
	Dana darurat -LRA	70.474.953.835,24	68.547.082.094,41	97,26	139.962.727.642,96
	<u>LRA</u>	51.388.904.917,24	49.482.210.306,01	96,29	80.984.886.360,00
	* Belanja	9.934.996.368,00	9.260.276.341,00	93,21	12.858.199.471,00
	BELANJA OPERASI	42.453.908.549,24	40.221.933.965,01	97,03	68.126.686.889,00
	- Belanja Pegawai	19.086.048.918,00	19.064.871.788,40	99,89	58.977.841.282,96
	- Belanja Barang dan Jasa	19.086.048.918,00	19.064.871.788,40	99,89	58.977.841.282,96
	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0.00	0,00

- Blj Modal Peralatan dan Mesin	0,00			0,00
- Blj Modal Gedung dan Bangunan				
- Blj Modal Aset Tetap Lainnya				
JUMLAH	(70.353.963.835,24)	(68.391.137.198,03)	97,21	(139.819.252.362,88)

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah - LRA Tahun 2020.

Gambaran Angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LRA dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0.00 realisasi penerimaan sebesar Rp. 23.836.890,38 atau 0.00% sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 11.367.280,08

Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA sebagai berikut :

Tabel 5.1.3 Realisasi Lian-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro - LRA	0.00	23.836.890,38	0.00	11.367.280,08
2	Pendapatan dari Pengembalian -LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	0.00	23.836.890,38	0.00	11.367.280,08

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berupa

- a. **Jasa Giro Pemegang Kas** dengan target anggaran sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 23.836.890,38 atau 0,00 %. Mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang teralisasi sebesar Rp.11.367.280,08

Berikut rincian penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas tahun 2020

Tabel.5.1.4 Penerimaan Jasa Giro Tahun 2020 dan Tahun 2019

No	Bulan	Realisasi 2020 (Rp.)	Realisasi 2019 (Rp.)
1	Januari	288.834,79	820.146,77
2	Pebruari	569.013,32	1.060.815,13
3	Maret	718.840,41	875.749,24
4	April	2.315.716,25	1.053.213,47
5	Mei	4.865.591,15	852.004,57
6	Juni	3.517.901,49	669.506,53

7	Juli	2.001.761,75	515.865,62
8	Agustus	2.018.467,41	630.584,66
9	September	1.959.407,96	1.250.684,82
10	Oktober	1.952.343,94	1.273.392,94
11	Nopember	1.905.414,22	1.211.623,66
12	Desember	1.723.597,69	1.153.692,71
	JUMLAH	23.836.890,38	11.367.280,08

Realisasi penerimaan Jasa Giro sebesar Rp. 23.836.8902,38 merupakan jumlah penerimaan Jasa giro selama Tahun Anggaran 2020. Yang mana semua penerimaan Jasa Giro tersebut di *auto debet* dengan dikeluarkannya Nota Debet oleh pihak bank.

5.1.2 BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja dengan target anggaran sebesar Rp 70.474.953.835,24 realisasinya sebesar Rp 68.547.082.094,41 atau 97,26%. Mengalami penurunan dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 139.962.727.642,96 Belanja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Berikut rincian belanja tahun 2020

Tabel.5.1.2 Belanja th.2020 dan tahun 2019

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2020(Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
a.	Belanja Operasi	51.388.904.917,24	49.482.210.306,01	96,29	80.984.886.360,00
b.	Belanja Modal	19.086.048.918,00	19.064.871.788,40	99,89	58.977.841.282,96
	Jumlah Belanja	70.474.953.835,24	139.962.727.642,96	97,26	139.962.727.642,96

1. Belanja Operasi

Target anggaran sebesar Rp.51.388.904.917,24 terealisasi sebesar Rp49.482.210.306,01 atau 96,29%, mengalami penurunan dibandingkan realisasi belanja th.2019 yang besarnya Rp.80.984.886.360,00.

Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.1.3 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Pegawai	9.934.996.368,00	9.260.276.341,00	93,21	12.858.199.471,00
2	Belanja Barang dan Jasa	41.453.908.549,24	40.221.933.965,01	97,03	68.126.686.889,00
	Jumlah	51.388.904.917,24	49.482.210.306,01	96,29	80.984.886.360,00

Gambaran realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

a) **Belanja Pegawai**

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan PNS.

Belanja Pegawai, terealisasi Rp. 9.260.276.341,00 dari anggaran Rp. 9.934.996.368,00 atau 93,13%,Mengalami penurunan dari realisasi tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp. 12.858.199.471,00 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1.4 Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.095.532.926,00	3.814.027.025,00	93,13	3.857.714.173,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.979.283.442,00	4.637.249.316,00	93,13	6.772.285.298,00
3	Honorarium PPBJ	0.00	0,00	0.00	3.120.000,00
4	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	0.00	0.00	0.00	6.720.000,00
5	Honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah	0.00	0,00	0.00	211.420.000,00
6	Honorarium Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0.00	2.006.940.000,00
7	Honorarium PNS	859.280.000,00	809.000.000,00	94,15	0,00
8	Honorarium Non PNS	900.000,00	0,00	0.00	0,00
	Jumlah	9.934.996.368,00	9.260.276.341,00	93,13	12.858.199.471,00

b) **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, dan perjalanan dinas, Tahun 2020 dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut

Belanja Barang dan Jasa, terealisasi Rp. 40.221.933.965,01, dari anggaran Rp.41.453.908.549,24 atau 97.03% mengalami penurunan dari realisasi tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp.68.126.686.889,-.

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	518.766.778,24	326.330.900,00	62,91	629.295.908,00
2	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	34.656.600,00	69,31	74.471.100,00
3	Belanja Jasa Kantor	32.846.588.026,00	32.625.704.490,00	68,85	61.639.734.700,00
4	Belanja Premi Asuransi	162.324.000,00	108.216.000,00	66,67	80.136.000,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	139.400.000,00	60.776.550,00	43,60	124.099.929,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.027.600,00	39.485.000,00	58,80	96.364.050,00
7	Belanja Makanan dan Minuman	36.136.300,00	22.395.200,00	61,97	72.959.400,00
8	Belanja Pakaian KerjaHari-	0,00	0,00	0.00	0,00

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
	Hari Tertentu				
9	Belanja Perjalanan Dinas	8.674.600,00	8.674.600,00	100	267.689.300,00
10	Belanja Pemeliharaan	5.958.617.245,00	5.364.760.625,01	90,03	2.698.388.052,00
11	Belanja Honorarium PNS	1.050.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00
12	Belanja Honorarium Non PNS	1.437.600.000,00	1.417.600.000,00	98,61	1.443.900.000,00
13	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.600.000,00	5.280.000,00	94,29	15.075.000,00
14	Belanja Jasa Konsultansi	223.124.000,00	208.054.000,00	93,25	889.591.450,00
15	Belanja Uang Yang diberikan Kepada Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0,00
	Jumlah	41.453.908.549,24	40.221.933.965,01	97,03	68.126.686.889,00

2. Belanja Modal

Target anggaran sebesar Rp. 19.086.048.918,00 terealisasi Rp. 19.064.871.788,40 atau sebesar 99.89% mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp.58.977.841.282,96. Komponen belanja modal sebagai berikut.

Tabel 5.1.5 Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.086.048.918,00	19.064.871.788,40	99,89	58.977.841.282,96
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0,00
	Jumlah	19.086.048.918,00	19.064.871.788,40	99,89	58.977.841.282,96

Belanja modal secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Komputer

Tabel 5.1.5.1. Rincian Belanja Modal Pengadaan Komputer

No	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan 2020	REALISASI 2020	
			Rp	%
1	Pengadaan Server Farm Security	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	100,00
2	Perangkat Manajemen Bandwidth	4.836.285.000,00	4.836.285.000,00	100,00
3	Belanja Lisensi Windows Server	19.472.200,00	15.812.500,00	81,21
4	Belanja Server	377.375.748,00	377.375.748,00	100,00
5	Pengembangan Penyediaan Akses Internet	10.508.545.170,00	10.508.545.170,00	100,00
6				
	Jumlah	18.591.678.118,00	18.588.018.418,00	99,98

Tabel 5.9. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

URAIAN	Saldo 2020	Saldo 2019
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	132.108.000,00	132.108.000,00
Lain-lain PAD yang sah – LO	23.836.890,38	11.367.280,08
Jumlah	155.944.890,38	143.475.280,08

Saldo masing-masing jenis PAD TA. 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

URAIAN	Saldo 2020	Saldo 2019
Penerimaan Jasa Giro – LO	23.836.890,38	11.367.280,08
Pendapatan dari Pengembalian– LO		
Jumlah	23.836.890,38	11.367.280,08

Pendapatan Jasa Giro pemegang kas tahun 2020 terealisasi Rp. 23.836.890,38 mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.469.610,03 dibandingkan tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp. 11.367.280,08.

B. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 0,00

Tabel 5.10. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2020 dan tahun 2019

No	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019
1	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LO	-	-
	- Pendapatan Hibah LO		

5.2.2 Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.Beban tahun 2020 terinci sebagai berikut :

Tabel 5.11 .Rincian Beban tahun 2020 dan tahun 2019

BEBAN	67,639,106,743.44	81,648,616,108.00
Beban Pegawai	9,157,689,373.00	12,692,877,199.00
Beban persediaan	558,458,325.00	863,866,883.00
Beban Jasa	35,474,776,483.00	49,058,965,061.00
Beban Pemeliharaan	5,425,537,175.01	2,822,487,981.00
Beban Perjalanan Dinas	8,674,600.00	267,689,300.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	17,013,970,787.43	15,942,729,684.00

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 terdapat beban sebesar Rp. 67.639.106.743,44 mengalami penurunan sebesar Rp. 14.009.509.364,56 dari realisasi tahun 2019 Rp. 81.648.616.108,00 Beban disini berupa beban operasi yang terdiri dari :

- Beban Pegawai terealisasi Rp. 9.157.689.373,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.535.187.826,00 atau 27,04 % dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 12.692.877.199,00

Tabel 5.12. Rincian beban pegawai tahun 2020 dan tahun 2019

URAIAN	Saldo 2020	Saldo 2019
Beban Gaji dan Tunjangan	3.814.027.025,00	3.857.714.173,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	4.534.662.348,00	6.772.285.298,00
Honorarium PNS	809.000.000,00	2.228.200.000,00
Jumlah	9.157.689.373,00	12.692.877.199,00

- Beban persediaan terealisasi Rp. 558.458.325,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 305.408.558,00 atau 35.35 % dari realisasi tahun 2019 Rp. 863.866.883,00

Tabel 5.13. Rincian beban persediaan tahun 2020 dan tahun 2019

URAIAN	Saldo 2020	Saldo 2019
Beban Bahan Pakai Habis	358.074.725,00	621.417.833,00
Beban Persediaan Bahan /Material	34.656.600,00	73.471.100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	41.966.800,00	96.018.550,00
Beban Makanan dan Minuman	118.480.200,00	72.959.400,00
Beban Belanja Pakaian Kerja	5.280.000,00	0.00
Jumlah	558.458.325,00	863.866.883,00

- Beban jasa terealisasi Rp. 35.474.776.483,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 13.584.188.578,00 atau 27,69% dari realisasi tahun 2019 Rp. 49.058.965.061,00

Tabel 5.14. Rincian beban jasa tahun 2020 dan tahun 2019

URAIAN	Saldo 2020	Saldo 2019
Beban Jasa Kantor	33.740.906.483,00	47.438.929.061,00
Beban Premi Asuransi	108.216.000,00	80.136.000,00
Beban Makanan dan Minuman	0,00	0,00
Beban Pakaian Kerja	0,00	0,00
Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0.00	0,00
Beban Jasa Konsultansi	208.054.000,00	0,00
Beban Honorarium PNS	0,00	96.000.000,00
Beban Honorarium Non PNS	1.417.600.000,00	1.443.900.000,00
Beban Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0.00	0,00
Jumlah	35.474.776.483,00	49.058.965.061,00

Beban Pemeliharaan terealisasi Rp. 5.425.537.175,01,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.603.049.194,01 atau 92,23 % dari realisasi tahun 2019 Rp. 2.822.487.981,00.

Tabel 5.15. Rincian beban pemeliharaan tahun 2020 dan tahun 2019

URAIAN	Saldo 2020	Saldo 2019
Beban Pemeliharaan	5.364.760.625,01	2.698.388.052,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	60.776.550,00	124.099.929,00
Jumlah	5.425.537.175,01	2.822.487.981,00

Beban Perjalanan Dinas Rp. 8.674.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 259.014.700,00 atau (96,76%) dari realisasi tahun 2019 Rp. 267.689.300,00

Tabel 5.16. Rincian beban perjalanan dinas tahun 2020 dan tahun 2019

URAIAN	Saldo 2020	Saldo 2019
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.575.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.099.600,00	267.689.300,00
Jumlah	8.674.600,00	267.689.300,00

- Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp. 17.013.970.787,43 mengalami kenaikan Rp. 1.071.241.103,43 atau 6,72% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 15.942.729.684,00.

Tabel 5.17. Rincian beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2020 dan tahun 2019

URAIAN	Saldo 2020	Saldo 2019
Beban Penyusutan	17.009.575.370,43	15.942.729.684,00
Beban Amortisasi	4.395.417.00	0,00
Jumlah	17.013.970.787,43	15.942.729.684,00

5.2.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional adalah Kegiatan yang terlaksana di luar kegiatan pokok.

5.2.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

5.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.1 Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.18. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2020 dan tahun 2019

URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019
EKUITAS AWAL	86.273.865.863,72	27.959.754.328,76
SURPLUS/DEFISIT LO	(67.483.161.847,06)	(81.505.140.827,92)
DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Koreksi Tambah Aset Tetap	208.054.000,00	-
Koreksi Kurang Aset Tetap	(10.662.846.054,40)	-
Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan	3.016.923.270,00	-
Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan	(3.959.598,30)	-
Koreksi Ekuitas Lainnya (Aset Lainnya	-	4.395.417,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	70.946.243.298,03	139.819.252.362,88
EKUITAS AKHIR	82.299.514.348,99	86.273.865.863,72

Ekuitas awal sebesar Rp. 86.278.261.280,72 yang merupakan saldo ekuitas th. 2020.

Surplus/Defisit LO terealisasi Rp.(67.483.161.847,06) mengalami penurunan dari realisasi

tahun 2019 sebesar Rp. (81.505.140.827,92).

Saldo Kewajiban untuk dikonsolidasikan tahun 2020 sebesar Rp. 70.946.243.298,03 mengalami penurunan sebesar Rp. 139.819.252.362,88 dari saldo tahun 2019.

Ekuitas Akhir tahun 2020 sebesar Rp. 82.299.514.348,99 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.974.351.514,73 dari saldo tahun 2019 Rp. 86.273.865.863,72

5.4 NERACA

Neraca merupakan laporan keuangan yang mencakup aset kewajiban dan modal/ekuitas. Berikut Total Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2020 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebagai berikut:
Komponen Aset terdiri dari :

1. Aset

			2020		2019
5.1.9	ASET	Rp.	0.00	Rp.	0.00
	Aset Lancar	Rp.	0,00	Rp.	0,00
	a.Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp.	0.00
	b.Persediaan	Rp.	6.693.200,00	Rp	24.763.825,00
	JUMLAH ASET LANCAR	Rp.	6.693.200,00	Rp.	24.763.825,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran per tanggal 29 Desember 2020, yang terdiri dari Sisa Kas (Uang Persediaan/UP) di bendahara pengeluaran per tanggal 29 Desember 2020 yang telah disetor ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yaitu STS UP Nomor: 001/STS/UP/GU/Diskominfo/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp. 522.666.290,00 (Fotocopy STS terlampir).

Sehingga saldo Bank Bendahara Pengeluaran di Bank BPD Bali dengan Nomor Rekening 009.010.5001910 sebesar Rp. 0,00

a.) Persediaan Tahun 2020 Rp 6.693.200,00

Rincian Persediaan tahun 2020 sebagai berikut

Tabel.5.19. Rincian Persediaan tahun 2020 dan tahun 2019

No	Persediaan	Saldo Awal (Rp.) Per 31 Des 2019	Mutasi		Saldo Akhir (Rp.) Per 31 Des 2020
			Tambah (Rp.)	Kurang (Rp.)	
1	Alat Tulis Kantor	2.773.825,00	1.419.000,00	2.773.825,00	1.419.000,00
2	Barang Cetak	360.000,00	663.200,00	360.000,00	663.200,00
3	Bahan Bakar	18.528.000,00	1.800.000,00	18.528.000,00	1.800.000,00
4	Perangko, Materai	3.102.000,00	2.811.000,00	3.102.000,00	2.811.000,00
Jumlah		24.763.825,00	6.693.200,00	24.763.825,00	6.693.200,00

Persediaan di Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.419.000,00 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 1.354.825,00.
2. Persediaan Barang Cetak sebesar Rp. 663.200,00 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 303.200,00.
3. Persediaan Bahan Bakar sebesar Rp. 1.800.000,00 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 16.728.000,00.
4. Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya sebesar Rp 2.811.000,00 mengalami Penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 291.000,00.

2. Aset Tetap Rp. 82.271.130.360,88

Saldo aktiva tetap pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 82.271.130.360,88

a) Tanah Rp. 0,00

b) Peralatan dan Mesin Rp. 127.744.439.046,53

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 127.744.439.046,53 mengalami peningkatan dari tahun 2019 dengan saldo Rp. 79.024.175.351,84

Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebesar Rp. 20.392.282.888,40.

Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2020 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi dan Imnformatika Kabupaten Badung periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2020, terinci sebagai berikut.

Tabel 5.20. Daftar Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2020

Saldo Akhir	Rp	127.744.439.046,53	Rp	118.015.002.212,53
		Tahun 2020		Tahun 2019
Saldo Awal				
- Peralatan dan Mesin	Rp	118.015.002.212,53	Rp	118.015.002.212,53
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	20.392.282.888,40	Rp	-
- Belanja Modal (Hutang)	Rp	-		-
- Non Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	0,00	Rp	0,00
	Rp.			
- Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran				
Jumlah	Rp	20.392.282.888,40	Rp	-
Pengurangan				
- Penghapusan peralatan dan mesin				
- Mutasi Absensi	Rp	9.514.619.909,00	Rp	0,00
- Mutasi Alat Vicon	Rp	1.146.372.500,00	Rp	0,00
- Ekstrak Kompetible	Rp	1.853.645,40		
- Pengembalian Mobil			Rp	0,00
- Koreksi (ekstra)			Rp	0,00
Jumlah	Rp	10.662.846.054,40	Rp	0,00
Jumlah	Rp	127.744.439.046,53	Rp	118.015.002.212,53

c) Gedung dan Bangunan Rp. 1.809.932.788,08

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.809.932.788,08 yang mana mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yang bersaldo Rp.1.612.112.638,08. Hal ini disebabkan karena adanya perpindahan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota, (Dari Jaringan ke Gedung Bangunan)

Tabel 5.17 Rincian Gedung dan Bangunan Tahun 2020

Saldo Akhir	Rp	1.809.932.788,08	Rp	1.809.932.788,08
		Tahun 2020		Tahun 2019
Saldo Awal				
- Gedung dan Bangunan	Rp	1.809.932.788,08	Rp	1.612.112.638,08
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp		Rp	197.820.150,00
- Non Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	-	Rp	197.820.150,00
Pengurangan				
- Koreksi (Penyesuaian)	Rp		Rp	0,00
- Kapitalisasi	Rp	0,00	Rp	0,00
- Koreksi (ekstra)	Rp	0,00		
- Pengembalan Mobil			Rp	0,00
- Koreksi (ekstra)			Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	1.809.932.788,08	Rp	1.809.932.788,08

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 188.918.250,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 188.918.250,00 yang artinya tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 Rp.. 39.169.511.260,69 Berikut rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2020.

Tabel 5.18 Rincian Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2020 dan tahun 2019

Saldo Akhir	Rp	188.918.250,00	Rp	188.918.250,00
		Tahun 2020		Tahun 2019
Saldo Awal		-		-
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	188.918.250,00	Rp	39.169.511.260,69
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	-	Rp	-
	Rp		Rp	0,00
		0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	-	Rp	-
Pengurangan				
- Penghapusan peralatan dan mesin				
- Koreksi (Penyesuaian)	Rp	0,00	Rp	38.782.772.860,69
- Kapitalisasi	Rp	0,00	Rp	
- Koreksi (Mapping)	Rp	0,00		197.820.150,00
- Pengembalan Mobil			Rp	0,00
- Koreksi (ekstra)			Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00	Rp	38.980.593.010,69
Jumlah	Rp	188.918.250,00	Rp	188.918.250,00

e) Aset Tetap Lainnya Rp 96.316.000,00

Saldo aset tetap lainnya pada Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2020 sebesar Rp 96.316.000,00 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019. Berikut rincian aset tetap lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2020.

Tabel.5.20 Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

Saldo Akhir	Rp	96,316,000.00	Rp	96,316,000.00
	Tahun 2020		Tahun 2019	
Saldo Awal				
- Aset Tetap Lainnya	Rp	96,316,000.00	Rp	96,316,000.00
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	-	Rp	-
- Non Belanja Modal	Rp	0.00	Rp	0.00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	0.00	Rp	0.00
Jumlah	Rp	-	Rp	-
Pengurangan				
- Penghapusan peralatan dan mesin				
- Koreksi (Penyesuaian)	Rp	0.00		
- Kapitalisasi	Rp	0.00	Rp	0.00
- Koreksi (ekstra)	Rp	0.00		
- Pengembalian Mobil			Rp	0.00
- Koreksi (ekstra)			Rp	0.00
Jumlah	Rp	0.00	Rp	0.00
Jumlah	Rp	96,316,000.00	Rp	96,316,000.00

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0,00

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan Pada Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00

Tabel 5.21 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2020 dan tahun 2019

Saldo Akhir	Rp	-	Rp	-
	Tahun 2020		Tahun 2019	
Saldo Awal				
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	-	Rp	-
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	-	Rp	-
- Non Belanja Modal	Rp	0.00	Rp	0.00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	0.00	Rp	0.00
Jumlah	Rp	-	Rp	-
Pengurangan				
- Penghapusan peralatan dan mesin				
- Koreksi (Penyesuaian)	Rp	0.00	Rp	0.00
- Kapitulasi	Rp	0.00	Rp	0.00
- Koreksi (ekstra)	Rp	0.00		
- Pengembalian Mobil			Rp	0.00
- Koreksi (ekstra)			Rp	0.00
Jumlah	Rp	0.00	Rp	0.00
Jumlah	Rp	-	Rp	-

f). Akumulasi Penyusutan Rp. (47.568.475.723,73)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. (47.568.475.723,73) mengalami kenaikan, dibandingkan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. (33.571.864.025,00) Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagaiberikut:

NO	URAIAN	NERACA 31 Des 2020	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2020	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2019
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	127.744.439.046,53	(47.352.488.039,73)	(31.637.797.675,00)
3	Gedung dan Bangunan	1.809.932.788,08	(112.719.249,00)	(37.615.962,00)
4	Jalan Irigasi Jaringan	188.918.250,00	(103.268.435,00)	(1.896.450.388,00)
5	Aset Tetap Lainnya	96.316.000,00	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	-	-
Jumlah		129.839.606.084,61	(47.568.475.723,73)	(33.571.864.025,00)

(Daftar penyusutan aset tetap tahun 2020 terlampir)

3. Aset Lainnya Rp. 30.256.711,11

- a) Tagihan Jangka Panjang Rp. 0,00
- b) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp. 0,00
- c) Aset Tidak Berwujud Rp. 0,00
- d) Aset Lain-lain Rp. 30.256.711,11

4. KEWAJIBAN Rp. 8.565.923,00

- 1) Kewajiban Jangka Pendek Rp. 8.565.923,00

Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

- a) Utang PFK Rp. 0,00
- b) Utang Bunga Rp. 0,00
- c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp. 0,00
- d) Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 0,00
- e) Utang Beban Rp. 8.565.923,00
- f) Utang Jangka Pendek Lainnya Rp. 0.00

Utang Beban Rp. 8.565.923,00

Saldo utang beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp.8.565.923,00, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 dimana saldo utang beban sebesar Rp. 111.405.923,00. Rincian utang beban per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

URAIAN	2020	2019
Belanja Telepon	678.781,00	630.893,00
Biaya Listrik CCTV	7.887.142,00	8.188.037,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif	0,00	34.184.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Dinamis Triwulan IV	0,00	68.402.968,00
Jumlah	8.565.923,00	111.405.898,00

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp. 0.00

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0.00 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dimana utang jangka pendek lainnya tercatat Rp.0,00

- 2). Kewajiban Jangka Panjang Rp. 0,00
 - a) Utang Dalam Negeri Rp. 0,00
 - b) Utang Luar Negeri Rp. 0,00

5. EKUITAS Rp. 82.299.514.348,99

- 1). Ekuitas Rp. 82.299.514.348,99

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2020 yang dikelola oleh SKPD, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 82.299.514.348,99 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp. 86.273.865.863,72 dengan rinciannya sebagai berikut.

URAIAN	2019	2019
EKUITAS AWAL	86.278.261.280,72	27.959.754.328,76
SURPLUS/DEFISIT LO	(67.483.161.847,06)	(81.505.140.827,92)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Tambah Aset Tetap	208.054.000,00	-
Koreksi Kurang Aset Tetap	(10.662.846.054,40)	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya (aset Lainnya)	0,00	4.395.417,00
Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan	3.016.923.270,00	0,00
Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan	(3.959.598,30)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	70.946.243.298,03	139.819.252.362,88
EKUITAS AKHIR	82.299.514.348,99	86.278.261.280,72

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 7 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung yang menyatakan mandat yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di Bidang Komunikasi dan Informatika. Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terdiri dari :

- 1 (satu) orang Kepala Dinas
- 1 (satu) orang Sekretaris
- 5 (lima) orang Kepala Bidang
- 15 (lima belas) orang Kepala Seksi
- 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian
- 27 (dua puluh tujuh) orang staf
- 87 (delapan puluh tujuh) orang Tenaga Kontrak.

BAB VII

KESIMPULAN PENTING TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Sebagai akhir dari Laporan Catatan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah Perubahan tahun 2020 yang direncanakan dapat direalisasikan atau dilaksanakan dengan prosentase capaian program pada BAB V diatas.

Program-program yang dilaksanakan capaian rata-rata pencapaian fisik 100 % sedangkan realisasi keuangannya rata-rata sebesar 97.21% diantaranya :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah dapat terlaksana dengan baik yakni dengan lancarnya pelaksanaan tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yakni untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangandiarahkan untuk menyusun pertanggungjawaban keuangan SKPD dan capaian realisasi keuangan.
3. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD dimaksudkan untuk tercapainya pelaksanaan tugas dengan baik dengan dukungan data yang akurat.
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa bertujuan untuk mempercepat informasi dan peningkatan penguasaan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
5. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dalam Penyerapan Informasi Media.
6. Program Pengelolaan Persandian Daerah
7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika ini dibuat sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tahun Anggaran 2020 yang berbasis Akrua! dimana Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Mangupura, 22 Maret 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Badung

I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos.M.A.P
Pembina TK I
NIP. 19750207 199311 1 002